

# **Sistem Pembelajaran dalam Keterpaduan Program Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Posyandu**

## **Satu Kajian Intervensi Pembelajaran Terhadap Pengembangan Anak Usia Dini**

**Sridadi Pudjo Suparto**

Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta

Korespondensi: Jl. Manunggal Jaya I/17, Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Email: sridadisuparto@yahoo.com

**Abstract:** Improving the quality of human resources is reflected partly by the increased level of health and nutritional status, level of education, emotional and spiritual maturity, optimal growth and development, welfare and protection. Achievement of optimal growth and development is largely determined by the quality of early childhood development from the fetus to the age of 6 (six) years. At this period of development of the child must be optimized to maintain the health and nutritional status of children, provide a sufficient stimulus, and provide a supportive environment. If this is not done, then the ability of the brain and child development to be carried away into a limited lifetime. Efforts have been made with the construction activities in the community that became the forerunner of early childhood development, such as Integrated Service Post (IHC), BKB (BKB), a Child Care (TPA), Group Play, and Early Childhood Education (early childhood). Various studies have been conducted and the results confirm the problems of lack of funds, implementation management, internal and cross-sector coordination, and problems of lack of skills of its human resources. To overcome these problems have been agreed upon holistic and integrative efforts within the organization through learning interventions (instructional solution) and not the learning intervention (non-instructional solution).

**Key words:** POSYANDU-BKB-early childhood, integration, learning intervention

**Abstrak:** Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicerminkan antara lain dengan meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, tingkat pendidikan, kematangan emosional dan spiritual, tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan. Pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan usia dini sejak janin sampai usia 6 (enam) tahun. Pada periode ini tumbuh kembang anak harus dioptimalkan dengan menjaga kesehatan dan status gizi anak, memberikan stimulus yang mencukupi, dan menyediakan lingkungan yang mendukung. Jika ini tidak dilakukan, maka kemampuan otak dan tumbuh kembang anak menjadi terbatas yang akan terbawa sepanjang hayat. Upaya telah dilakukan dengan dibangunnya berbagai kegiatan di masyarakat yang menjadi cikal bakal pengembangan anak usia dini, seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain, dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Berbagai studi telah dilakukan dan hasilnya mengkonfirmasi permasalahan kurangnya dana, manajemen penyelenggaraan, koordinasi lintas maupun internal sektor, dan permasalahan kurang-terampilan sumber daya manusianya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disepakati upaya holistik dan integratif dalam penyelenggaraan melalui intervensi pembelajaran (*instructional solution*) dan intervensi bukan pembelajaran (*non-instructional solution*).

**Kata kunci :** POSYANDU-BKB-PAUD, keterpaduan, intervensi pembelajaran

Berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat maupun swasta telah berpartisipasi sejak lama sebagai Pelaku Pengembangan Anak Usia Dini melalui POSYANDU, BKB, TPA, Taman Bermain dan PAUD. Misi mereka sama yakni memberikan pelayanan dan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi, tingkat pendidikan, kematangan emosional dan spiritual, tumbuh kembang yang optimal, kesejah-

teraan, dan perlindungan anak usia dini. Berbagai studi menyimpulkan bahwa perkembangan otak pada masa awal kehidupan seseorang akan menentukan kualitas kesehatan fisik dan mental, kemampuan belajar dan perilaku sepanjang hayatnya. Sudah dipahami tentang pentingnya masa keemasan dan kesiapan untuk masuk sekolah dasar perlu dikelola dengan baik. Telah pula dilakukan upaya yang cukup signifikan aplikasinya di lapa-

ngan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta. Namun beberapa studi dan pengamatan dari banyak pihak menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan kurang profesional, terbatasnya jumlah lembaga penyelenggara dibandingkan dengan sasaran didik yang membutuhkan, distribusi dan kualitas tenaga kurang merata, serta fasilitas kurang memadai. Kondisi ini tercermin dari pelayanan yang belum memenuhi seluruh aspek kebutuhan esensial anak, serta pelayanan yang belum terintegrasi (Bappenas, 2009).

Studi tersebut mengungkapkan bahwa pemahaman para pemangku kepentingan baik dari pengambil kebijakan, penyelenggara, dan masyarakat akan pentingnya pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif juga masih sangat terbatas. Permasalahan-permasalahan tersebut berakibat pada terbatasnya jangkauan, jenis pelayanan, dan kesenjangan pemenuhan kebutuhan esensial. Hal ini akan sangat merugikan karena hilangnya kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal. Berangkat dari Studi kebijakan pengembangan anak usia dini kemudian dirumuskan satu acuan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, dalam memenuhi kebutuhan esensial secara utuh, terintegrasi, menyeluruh, bertahap dan menjangkau semua anak usia dini. Satu program yang sangat komprehensif dengan jangkauan luas dan dimensi waktu kedepan yang memerlukan kesepakatan dan koordinasi pelaksanaan di semua tingkatan administrasi pemerintahan, pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan di lapangan.

Agar kebijakan maupun pedoman yang telah dirumuskan dapat direalisasikan, salah satu upaya strategis yang perlu diambil adalah menyipkan para pelaku terutama yang berada di lapangan. Pemahaman tentang pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif bagi para pemangku kepentingan di semua tingkatan serta kompetensi para pelaku di lini lapangan merupakan tujuan utama dalam sistem pembelajarannya. Di tingkat ini, kader, penyuluh, dan pendidik anak usia dini merupakan tenaga inti yang perlu segera mendapatkan pembekalan wawasan

dan keterampilan untuk dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan.

## **PELAKU PENYELENGGARA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI Bina Keluarga Balita ( BKB )**

Proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah dimulai dari sejak janin dalam kandungan. Proses pembangunan sumberdaya manusia oleh karenanya sudah mencakup awal berkembangnya embrio dalam kandungan yang dipengaruhi kehidupan kesehatan ibu dan lingkungan. Masa pertumbuhan dan perkembangan sampai dengan usia sekolah telah menjadi perhatian beberapa lembaga pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. BKB adalah salah satu kegiatan atau wadah kegiatan keluarga yang mempunyai anak berumur di bawah lima tahun (balita). Filosofi yang mendasari dibangunnya BKB adalah bahwa dalam keseluruhan siklus hidup manusia, masa di bawah lima tahun merupakan periode yang paling kritis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, pada lima tahun pertama kehidupan manusia, proses tumbuh kembang berjalan sangat cepat. Para ahli mengatakan bahwa masa balita disebut sebagai masa emas (*golden age period*). Apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelektual, dan moral yang akan sangat menentukan sikap serta nilai pola perilaku seseorang di kemudian hari, oleh karena itu diperlukan Program BKB (Bina Keluarga Balita, BKKBN 2007). Kegiatan BKB ini mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki, baik dalam aspek fisik, kecerdasan, emosional maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang maju mandiri dan berkualitas.

Melalui kegiatan BKB diharapkan setiap keluarga akan mampu meningkatkan kemampuannya terutama dalam membina anak-anak balitanya dan anak pra sekolah sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal, berkepribadian luhur, cerdas serta taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program BKB bertujuan untuk meningkatkan pe-

ngetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya. Ia merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga (bagian dari delapan fungsi keluarga). Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut diharapkan orang tua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas. Program BKB memberikan wawasan, pengetahuan dan kemampuan bagi orangtua atau anggota keluarga lainnya agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak balitanya. Dengan mengikuti kegiatan BKB orangtua akan lebih memahami perkembangan dan ciri-ciri khas pada usia tertentu serta mengetahui cara dan dapat melakukan pembinaan agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kegiatan pokok BKB meliputi sosialisasi peran keluarga, bimbingan dan konsultasi, pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dan Keluarga Muda Mandiri (KMM). *Parenting skills* juga dilakukan agar keluarga memahami dan mampu melakukan perawatan, pengasuhan, pengasahan, dan perlindungan terhadap anak. Faktor pembeda program BKB dengan program anak usia dini yang lain antara lain adalah: (1) program BKB menitik beratkan pada pembinaan orangtua dan anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita; (2) membina tumbuh kembang anak balita; (3) menggunakan alat bantu dalam hubungan timbal balik antara orangtua dan anak berupa alat permainan antara lain Alat Permainan Edukatif (APE), cerita, dongeng, nyanyian sebagai perangsang tumbuh kembang anak; dan (4) menitik beratkan perlakuan orang tua yang tidak membedakan anak laki-laki serta perempuan. Kegiatan BKB biasanya dilaksanakan sebulan sekali selama 2 jam/kunjungan (Bappenas, 2009).

### **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD dapat diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Jalur formal dilakukan oleh Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) atau yang sederajat; dan jalur pendidikan nonformal, diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) atau yang sederajat; jalur pendidikan informal yaitu yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan. Tujuan utama (*Primary Goal*) PAUD adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sedini mungkin yang meliputi aspek-aspek fisik, psikis, dan sosial secara menyeluruh yang merupakan hak anak. Adapun tujuan penyertanya (*Nurturing Goal*) adalah membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Bahan belajar untuk kegiatan Pos PAUD berupa bahan cetak, bahan belajar elektronik, alat peraga pendidikan dan Alat Permainan Edukatif (APE). APE disesuaikan dengan kebutuhan main anak yang merujuk pada tahap perkembangan anak. Adapun sasaran utama kegiatan PAUD adalah pendidik dan pengelola lembaga pendidikan Anak Usia Dini serta Lembaga atau masyarakat yang menyelenggarakan PAUD (Panduan Pelayanan Terpadu PAUD, BKKBN Sulteng, 2008).

Sementara itu PAUD dalam bentuk lain seperti BKB dan Posyandu selain memberikan pelayanan langsung pada anak juga memberikan pelayanan tidak langsung berupa pendidikan bagi ibu. Dengan demikian, program perawatan dan pendidikan bagi anak usia dini telah mulai dilaksanakan secara komprehensif, baik yang secara langsung ditujukan untuk mendidik anak maupun yang secara tidak langsung mendidik ibunya.

Mengingat sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama ibunya, maka pemberian pendidikan bagi ibu sebagaimana diberikan melalui Posyandu dan BKB memberikan manfaat sangat besar dalam menerapkan pola asuh pada anak usia dini secara benar. Kegiatan PAUD biasanya dilakukan 3 kali seminggu selama 2-3 jam / hari (Bappenas, 2009).

### **Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)**

Dari perkembangannya upaya perbaikan gizi di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950-an yang dimulai dengan pembentukan panitia perbaikan makanan rakyat di Jawa Tengah. Pada tahun yang bersamaan kegiatan serupa dilaksanakan di berbagai negara lain. *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *World Health Organization (WHO)* merumuskan satu program yang dinamakan *Applied Nutrition Program (ANP)* yaitu upaya yang bersifat edukatif untuk meningkatkan gizi rakyat terutama golongan rawan gizi dengan peran serta masyarakat setempat dengan dukungan dari berbagai instansi secara terkoordinasi. Tahun 1969 berbagai instansi menyepakati lahirnya program Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UP-GK). Seterusnya tahun 1984 Posyandu dicanangkan oleh masyarakat dengan bantuan alat dan tenaga khusus dari pemerintah.

Posyandu secara umum bertujuan untuk menunjang pencapaian penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Adapun Posyandu secara khusus bertujuan (1) meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB; (2) meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB; (3) meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB. Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya: (1) bayi; (2) anak balita; (3) ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui, dan Pasangan Usia Subur (PUS). Kegiatan Posyandu dilaksanakan oleh kader Posyandu yang

berasal dari anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela. (Panduan Pelayanan Terpadu PAUD, BKKBN Sulawesi Tengah, 2008) Penyelenggaraan Posyandu dilaksanakan dengan pola lima meja. Kegiatan dilakukan satu bulan satu kali.

Posyandu berperan sebagai unit pelayanan dasar masyarakat yang langsung memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan kualitas manusia sejak dini, sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga. Agar Posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya maka perlu upaya revitalisasi terhadap fungsi dan kinerja Posyandu. Upaya tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 1999 diseluruh Indonesia, tetapi masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, upaya revitalisasi Posyandu perlu terus ditingkatkan agar bisa memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan mampu meningkatkan atau mempertahankan status gizi serta derajat kesehatan ibu dan anak. Secara terperinci Revitalisasi mempunyai tujuan sebagai berikut. (1) Meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu. (2) Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan Posyandu. (3) Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat dan obat di Posyandu. (4) Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan Posyandu. (5) Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu.

### **Keterpaduan dalam Program Anak Usia Dini Holistik dan Integratif**

Pengamatan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini dilakukan di propinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan sasaran Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga penyelenggara PAUD. Secara garis besar, tanggapan masyarakat sangat positif, namun fasilitas sangat terbatas dan mutu pengasuh PAUD juga sangat bervariasi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi adalah kurang adanya koordinasi antara pelaku atau penyelenggaraan pengembang-

an anak usia dini, keterbatasan biaya dan rendahnya mutu pengasuh atau pelaku PAUD baik para kader, pendidik, orang tua atau anggota keluarga lain. (Bappenas, 2009)

**Permasalahan yang teridentifikasi secara rinci meliputi :**

Pengetahuan para pejabat propinsi mengenai pentingnya PAUD terintegrasi masih terbatas, dan PAUD belum ditetapkan sebagai program prioritas. Di masa lalu dengan pengetahuan terbatas, tampak ada upaya Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemberian pelayanan kesehatan, gizi, dan pendidikan bagi anak usia dini, sekarang tidak terlihat lagi kegiatannya di lapangan, seperti Bina Keluarga Balita (BKB) asuhan BKKBN, dan Kelompok Bermain asuhan Departemen Sosial. Namun demikian, Pemerintah Daerah Propinsi pada umumnya sepakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan PAUD secara terintegrasi melalui koordinasi lintas dinas /instansi. Disamping itu terlihat adanya peningkatan pemahaman dan harapan serta antusiasme masyarakat akan tumbuh kembang anak usia dini (Bappenas, 2009).

Hasil analisis dari studi-studi yang ada menyebutkan bahwa: Fasilitasi perlu segera dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya pengembangan anak usia dini bagi pemerintah Daerah propinsi dan kabupaten/kota. Untuk memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelayanan PAUD terintegrasi, perlu dirumuskan mekanisme koordinasi dan kelembagaan, baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Komitmen dan kepemimpinan Bappeda Propinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi modal utama dalam melaksanakan pengintegrasian upaya ini. Perlu ditinjau kembali rencana dan pelaksanaan program PAUD yang belum berjalan maksimal di lapangan. Peningkatan kemampuan para kader atau pelaku di lapangan perlu dilakukan, baik melalui pelatihan maupun pendampingan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau relawan ahli di bidang PAUD, diperlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terintegrasi sebagai pedoman bagi para pelaksana di lapangan, diperlukan

kebijakan yang memberi keberpihakan kepada anak miskin dalam mengakses pelayanan PAUD. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan PAUD yang terintegrasi, perlu disusun indikator proses dan *output* serta mekanisme monitoring-nya.

**Ciri-ciri Holistik-Integratif**

Pendekatan yang holistik dan integratif mempunyai karakteristik seperti berikut. (1) Memberikan pelayanan yang komprehensif meliputi stimulasi pada bayi dan anak, pendidikan orangtua, pendidikan secara dini yang dilakukan di rumah dan di pusat-pusat pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan gizi, penyediaan sanitasi yang baik dan sehat; (2) Pada tingkat komunitas, berbagai institusi yang menyediakan layanan-layanan tersebut perlu saling mendukung dan menguatkan. (3) Memastikan pembinaan yang berkesinambungan. Sistem pelayanan yang terkoordinasi dan terintegrasi secara baik harus memberikan pelayanan yang berkelanjutan sejak anak belum lahir sampai anak umur 6 tahun. Menekankan sejak kehamilan sampai dengan anak umur 3 tahun mengingat masa keemasan (*golden age*), kecepatan tumbuh kembang masa itu yang harus di fasilitasi. Perlakuan yang sama perlu diberikan pada anak laki-laki dan perempuan agar berbagai bentuk diskriminasi gender dapat dihindari sejak dini. (4) Menyediakan pendidikan bagi orangtua, pengasuh, dan keluarga serta keterlibatan masyarakat. (5) Masyarakat dapat dilibatkan pada tahap penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, sehingga rasa memiliki terhadap program dari masyarakat menjadi lebih kuat. (6) Mengakses program yang secara budaya, tepat. Seluruh suku bangsa, kelompok sosial ekonomi yang ada di masyarakat harus mendapat kesempatan untuk mengakses pelayanan ini. Isi program (*content*) hendaknya mempertimbangkan budaya lokal dan pengalaman budaya lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan anak yang optimal. (7) Memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan pelayanan khusus. Pelayanan hendaknya dirumuskan untuk

juga memenuhi kebutuhan anak yatim piatu, juga anak-anak yang berada dalam situasi konflik.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif maka pelayanan tersebut benar-benar memperhatikan pemenuhan seluruh kebutuhan anak usia dini yang dilakukan dari sisi investasi pendidikan untuk penyiapan anak memasuki tahap pendidikan selanjutnya yang dapat dilihat dari anak lebih siap bersekolah dan berprestasi secara akademik. Dari sisi kesehatan termasuk gizi, investasi kesehatan dan gizi yang tepat dapat dilihat dari menurunnya angka kesakitan dan kematian, kurang gizi serta meningkatnya *hygiene* dan perawatan kesehatan, serta menurunnya kekerasan terhadap anak.

## DESAIN SISTEM PEMBELAJARAN

### Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Keluarga Sejahtera BKKBN, hasil penelitian kebijakan Bappenas dan keterpaduan pengembangan anak usia dini, serta hasil penelitian Arsyad (2008, 2010), rekomendasinya mencakup *Non-instructional Solutions* dan *Instructional Solutions*. Penggolongan dua intervensi tersebut merupakan jalan keluar secara sistemik dalam pendekatan Teknologi Kinerja (*human performance technology*). Allison Rossett, Kaufman dan English (1992) dalam *Handbook of Human Performance Technology* menyatakan bahwa: diperlukan analisis yang mendalam untuk menetapkan kesenjangan antara kinerja yang diinginkan dan yang dihasilkan. Dari temuan akar masalah sebagai hasil analisis akan dapat ditentukan apakah intervensinya terbatas pada intervensi "Pembelajaran" atau "Bukan Pembelajaran yang berupa intervensi dalam domain manajemen yang lebih luas" Atau diperlukan dua-duanya. Intervensi pembelajaran antara lain mencakup pelatihan formal, pembelajaran mandiri melalui modul, pembelajaran melalui *Online Learning*, *On The Job Training*, *Coaching*, dan *Mentoring*. Intervensi bukan pembelajaran antara lain mencakup *Job aids*, strategi seleksi, program kompensasi dan insentif, motivasi, atau mendesain kembali sistem kerja. Selama ini yang dihadapi

oleh para pelaku program pengembangan anak usia dini sebagaimana diperlihatkan oleh beberapa penelitian, menyebutkan masalah yang dihadapi memerlukan intervensi "Pembelajaran/*Instructional*" maupun intervensi "Manajemen secara luas (*Non Instructional*)". Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembelajaran bagi para pelaku di lapangan khususnya para kader dan pendidik dan para orang tua. Demikian juga diperlukan penataan kembali sistem dan mekanisme kerja sesuai konsep keterpaduan dalam mengembangkan anak usia dini {(Arsyad, 2008), (Arsyad, 2010), (Bappenas, 2009)}. Berdasarkan hasil penelitian penelitian tersebut telah mendorong disepakatinya pendekatan keterpaduan lintas sektor di tingkat pusat dan lintas dinas di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Kesepakatan dalam tingkat kebijakan strategi serta kegiatan yang melibatkan semua sektor/dinas terkait tersebut memerlukan upaya sosialisasi dan tindak nyata di lapangan yang segera harus di koordinasikan dan direalisasikan melalui pihak-pihak yang terkait.

Identifikasi masalah yang dilakukan secara sistemik dan prosedur sistematis akan menghasilkan akar masalah yang solusinya terbagi menjadi (1) Pemecahan Masalah melalui Pembelajaran dan (2) Pemecahan Masalah Bukan Pembelajaran atau solusi Manajemen pada umumnya. (Stolovitch, *Handbook of Human Performance Technology*, 2006) Solusi pembelajaran yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sebagian dari permasalahan kinerja organisasi maupun kinerja para pekerja dalam organisasi, masih harus dirinci lagi. Karakteristik dari akar masalah perlu diketahui untuk dapat menentukan program spesifik mana yang paling tepat untuk mengatasi masalah kesenjangan kinerja para pekerjanya, (terutama kader PAUD, BKB & Posyandu). Dalam isu pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegratif telah diketahui dua isu besar yakni diperlukan sosialisasi dan pembelajaran bagi para pelaku dan secara simultan segera dilakukan penataan lapangan yang berbasis koordinasi, integrasi, dan holistik. Dua langkah yang sama pentingnya ini harus dilakukan secara simultan karena beberapa prinsip dalam pe-

ngembangan sistem pembelajaran yang perlu dipertimbangkan.

### Desain Pelatihan

Dalam artikel ini salah satu solusi pembelajaran yang akan dibahas secara mendalam adalah Pelatihan yang menggunakan model pengembangan *ADDIE* yaitu *Analysis* (analisis), *Design* (desain), *Development* (pengembangan), *Implementation* (implementasi), dan *Evaluation* (evaluasi) dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkait. Uraianya sebagai berikut.

1. Prinsip yang harus diperhatikan adalah lingkungan pembelajaran yang sedapat mungkin juga merupakan gambaran lingkungan kerja senyatanya. Itulah sebabnya pembenahan manajemen dan operasional program pengembangan anak usia dini harus dilakukan secara simultan dengan upaya pembelajaran bagi para pelaku programnya.
2. Prinsip tentang lingkungan tersebut mempunyai kaitan dengan upaya “mengaplikasikan hasil pelatihan pada pekerjaan sesudah pelatihan berakhir” Terminologi dalam sistem pelatihan itu disebut dengan “*Transfer of Training*” (Suparto, 2006).
3. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan langkah evaluasi yang dilakukan sesudah seseorang menyelesaikan suatu pelatihan (Evaluasi Pasca Pelatihan) Evaluasi ini akan menunjukkan kemampuan seseorang tidak terlepas dari lingkungan kerjanya. Evaluasi ini juga akan menunjukkan efektif atau tidaknya penyelenggaraan pelatihannya.
4. Pada tahap analisis kebutuhan pelatihan, berdasarkan berbagai hasil studi dan mengacu pada aspek pembelajaran di atas telah teridentifikasi bahwa kompetensi untuk dapat melaksanakan tugas dan pemahaman tentang kinerja masing-masing pelaku dan kader di lapangan masih belum dimiliki. Tersusul kemudian dengan kesepakatan tentang pendekatan holistik dan integratif yang segera harus dikoordinasikan pelaksanaannya. Dua isu tersebut telah menjadi indikasi diperlukannya solusi dalam pembelaj-

ajaran disamping banyaknya isu yang memerlukan solusi dalam aspek manajemen, koordinasi, dan keterpaduan.

5. Pada tahap desain (*design*), prinsip pembelajaran dalam pengembangan desain pelatihan akan memperhatikan kompetensi dan kinerja peserta pelatihan sebagai acuan dalam pengembangan sistem pembelajaran dalam pelatihan. Kompetensi dan kinerja peserta pelatihan sudah disesuaikan dengan kondisi dan pemahaman lingkungan kerja untuk melakukan *transfer of training* (Suparto, 2006). Ini berarti diperlukan adanya satu kesepakatan dan keputusan tentang kompetensi dan standar kinerja para pelaku program pengembangan anak usia dini utamanya yang berada di lini lapangan, khususnya diperlukan dalam merumuskan Tujuan Pelatihan. Dari tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dapat ditetapkan indikator keberhasilan yang akan menjadi acuan evaluasi hasil belajar.
6. Masih pada tahap desain dalam kaitan mengembangkan desain pelatihan, karakteristik para pelaku program sebagai peserta pelatihan akan berpengaruh terhadap pengembangan sistem pembelajarannya. Adapun karakteristik peserta pelatihan kader BKB memiliki kriteria antara lain: (1) laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai minat terhadap anak; (2) paling sedikit dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat; (3) bersedia bekerja sebagai tenaga sukarela; (4) bersedia dilatih sebelum mulai melaksanakan tugas; dan (5) mampu berkomunikasi dengan orang tua Balita secara baik. (Bahan Penyuluhan BKB, BKKBN, 2007). Selain itu latar belakang pendidikan dan pengalamannya serta identitas diri lain yang terkait dengan proses pembelajaran perlu digali dan dipergunakan dalam pengembangan selanjutnya. Adapun untuk kriteria kader PAUD dan Posyandu juga hampir sama dengan kader BKB hanya bedanya kader PAUD lebih fokus untuk memberikan

pembelajaran kepada anak sedangkan kader Posyandu lebih fokus untuk memberikan penyuluhan kepada ibu (orang tua) terutama tentang pengetahuan kesehatan dan gizi.

7. Identifikasi materi pokok akan menjadi langkah yang sangat penting agar tujuan pelatihan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Hasil dari tahap analisis kebutuhan pelatihan akan menjadi acuan materi pokok pelatihan. Acuan pokok akan berkisar pada materi yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi dan pemenuhan standar kinerja, serta perubahan kebijakan dan strategi maupun program pengembangan anak usia dini menjadi program pengembangan yang holistik dan integratif. Prinsip-prinsip keterpaduan dan bagaimana aplikasinya akan di pandu oleh

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Anak Usia Dini di lapangan. Ia akan menjadi acuan identifikasi materi dalam pembelajaran. Berdasarkan Panduan Pelayanan Terpadu Pengembangan Anak Usia Dini "BALITA SEHAT CERIA" Integrasi Posyandu, BKB dan PAUD di Sulawesi Tengah (BKKBN, 2008), Acuan Menu Pembelajaran pada PAUD (Direktorat PAUD, 2002) serta Bahan Penyuluhan BKB Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (BKKBN, 2007) maka rumusan materi pokok BKB, Posyandu dan PAUD serta keterpaduannya yang Holistik-Terintegrasi dapat diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Materi Pokok Pelatihan Kader BKB, PAUD, Posyandu dan Keterpaduannya yang Holistik-Terintegrasi**

MATERI BKB	MATERI PAUD	MATERI POSYANDU	KETERPADUAN MATERI BKB-PAUD-POSYANDU yang Holistik-Terintegrasi
(1) Peranan orang tua dalam membina tumbuh kembang anak mencakup konsep diri orang tua, konsep diri yang sehat, manfaat memiliki konsep diri yang sehat, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, mengembangkan konsep diri yang sehat, mengembangkan konsep diri orang tua, dan upaya kader dalam mengembangkan konsep diri orang tua.	Materi kegiatan untuk anak dikembangkan merujuk pada pencapaian kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya (kelompok usia 0-6 tahun), sebagaimana tercantum pada "Menu Pembelajaran Generik" yang mencakup materi 9 kemampuan belajar anak berdasarkan kecerdasan majemuk ( <i>multiple intelligences</i> ) dan materi yang mengacu 6 aspek pengembangan:	(1) Materi administrasi posyandu: pendaftaran, penimbangan. Dan pencatatan / pengisian KMS (2) Penyuluhan evaluasi KMS, KIE Kesehatan, Gizi dan KB (3) Pelayanan kesehatan	(1) Untuk efisiensi tenaga kader dan atau bila tidak semua daerah ada kader BKB/Posyandu/PAUD) serta jadwal posyandu yang biasanya (minimal) hanya 1 bulan sekali sehingga tidak mengganggu jadwal kegiatan BKB dan PAUD, maka materi Posyandu dapat diberikan kepada kader BKB dan PAUD. Dengan demikian kader BKB dan PAUD dapat merangkap menjadi kader posyandu. Begitu pula jika hanya ada kader Posyandu dan BKB/PAUD.
(2) Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Balita mencakup pengertian pertumbuhan dan perkembangan, ciri-ciri dan prinsip tumbuh kembang anak, hal-hal yang menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan balita, pertumbuhan balita, perkembangan balita, peranan orang tua dalam mendidik dan membantu perkembangan balita, pemantauan perkembangan balita melalui Kartu Kembang Anak (KKA).	(1) pengembangan moral dan nilai-nilai agama, (2) pengembangan fisik, (3) pengembangan bahasa, (4) pengembangan kognitif, (5) pengembangan sosial emosional, (6) pengembangan seni.		(2) Materi pertumbuhan dan perkembangan anak (BKB) dapat diberikan juga kepada kader PAUD atau Posyandu (bila tidak ada kader PAUD). (3) Materi pembentukan karakter sejak dini (BKB) dapat juga diberikan kepada kader PAUD atau Posyandu (bila tidak ada kader PAUD) (4) Cara mengasuh anak usia 0-6 tahun (BKB) dapat juga diberikan kepada kader PAUD atau Posyandu (bila tidak ada kader PAUD). (5) Materi 9 kemampuan belajar anak (kecerdasan majemuk) dapat diberikan kepada kader BKB dan atau Posyandu bila tidak ada kader PAUD atau bila di daerah kekurangan kader PAUD.
(3) Pembentukan karakter sejak dini	Materi untuk orang tua untuk balita usia 0-2 tahun		(6) Materi 6 aspek pengembangan PAUD dapat juga diberikan kepada BKB atau Posyandu (bila tidak ada kader Posyandu).
(4) Lingkungan sehat			(7) Materi gizi dan pelayanan kesehatan anak dapat diberikan kepada kader BKB dan PAUD bila
(5) Media interaksi orang tua dan anak (a) monitoring tumbuh kembang anak (KMS dan KKA), kunjungan rumah, dan rujukan.	(1) Pemahaman tentang pentingnya pendidikan sejak dini. (2) Pemahaman tahap-tahap tumbuh kembang anak		
(6) Cara mengasuh anak usia 0-6 tahun mencakup sub materi 3			

<p>(7) kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua mulai dari kebutuhan fisik dan biologis, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi. Untuk materi kebutuhan stimulasi harus memenuhi 7 aspek perkembangan mulai dari perkembangan kemampuan gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. Selain itu ditambahkan kemampuan moral dan nilai agama mulai usia anak 1-6 tahun.</p>	<p>(3) Kemampuan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak</p> <p>(4) Kemampuan melakukan berbagai perangsang yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak</p> <p>(5) Kemampuan memilih dan memfasilitasi anak dengan alat bermain yang mendidik.</p> <p>(6) Kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber bermain dan belajar anak.</p>	<p>di daerah tidak ada kader Posyandu (kekurangan tenaga kader Posyandu)</p> <p>(8) Untuk materi PAUD yang diberikan pada anak (0-6 tahun) sebaiknya juga disosialisasikan kepada orang tua sehingga orang tua dapat menindaklanjuti pembelajaran PAUD di rumah. Artinya komunikasi dan koordinasi antara kader PAUD dan BKB sangat penting dilakukan sehingga pembelajaran pada anak (0-6 tahun) dapat dilaksanakan secara berkesinambungan baik di kelas PAUD maupun di rumah oleh orang tua.</p> <p>(9) Materi <i>Transfer of Training</i> tentang bagaimana strategi yang efektif dan efisien agar kader dapat mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku pada saat pelatihan kepada orang tua/pendidik PAUD.</p>
--	--	--

Mengacu pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa untuk pelatihan BKB materi pokok yang diwajibkan terdapat pada kolom 1 dan 4 sedangkan untuk kolom 2 dan 3 tetap diberikan sebagai wawasan kader BKB. Selanjutnya pelatihan PAUD materi pokok yang diwajibkan terdapat pada kolom 2 dan 4 sedangkan untuk kolom 1 dan 3 tetap diberikan sebagai wawasan kader PAUD. Untuk pelatihan Posyandu materi pokok yang diwajibkan ada pada kolom 3 dan 4 sedangkan untuk kolom 1 dan 2 tetap diberikan sebagai wawasan kader Posyandu.

8. Selain itu dalam tahap desain menentukan tujuan pembelajaran khusus (TPK) harus mengandung unsur-unsur ABCD yaitu: *Audience* adalah peserta; *Behavior* adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh mahasiswa setelah selesai proses belajarnya dalam pelajaran tersebut), *Condition* adalah kondisi, yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta atau alat yang digunakan pada saat ia dites, bukan pada saat ia belajar; dan *Degree* adalah tingkat keberhasilan peserta pelatihan dalam mencapai perilaku tersebut. Unsur-unsur ini dapat memberikan petunjuk kepada penyusun tes agar dapat mengembangkan tes yang benar-benar dapat mengukur perilaku yang terdapat di

dalamnya (Suparman, 2004). Adapun TPK sebaiknya mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) serta sikap dan perilaku (*attitude*). Sehingga peserta pelatihan tidak hanya mengerti pengetahuan dan wawasan tentang PAUD tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dipraktekkan saat penyuluhan/kegiatan bermain kepada anak dan orang tua serta memiliki sikap dan perilaku yang baik. Hal tersebut senada dengan *Bloom's Taxonomy* yang mengklasifikasikan tujuan berdasarkan aspek kognitif (*cognitive*) berhubungan dengan ingatan atau pengenalan akan suatu *knowledge* dan pengembangan suatu *skills*, aspek afektif (*affective*) berhubungan dengan perasaan, emosi, apresiasi, dan sebagainya untuk mengerjakan sesuatu, serta aspek psikomotor (*psychomotor*) berhubungan dengan kegiatan *neuromuscular* untuk mengerjakan sesuatu (Bloom, 1956). setelah menentukan tujuan, perlu ditentukan metode penyampaian yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks ini pelatihan formal lebih sesuai untuk diterapkan mengingat jumlah peserta yang cukup banyak dan materi yang cukup padat. Selain itu metode penyampaian *On-The-Job Training/coaching/mentoring* dapat dilaksanakan secara berkelompok setelah

peserta mengikuti pelatihan dan kembali ke tempat kerja, metode ini dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mengawasi dan memperbaiki kinerja kader saat praktek di lapangan.

9. Dalam menyampaikan materi pelatihan harus juga dipertimbangkan gaya belajar peserta pelatihan yang berbeda-beda, antara lain gaya belajar visual baik *visual linguistic* yang menyukai belajar dengan menulis dan membaca materi yang diberikan dan atau *visual spatial* yang lebih menyukai grafik, demonstrasi, video, dan lain-lain; gaya belajar auditor belajar dengan mendengarkan materi baik dari pelatih maupun dari dirinya sendiri; dan gaya belajar kinestetik, belajar dengan banyak bergerak dan sentuhan (Flemming, 2001). Selain itu pelaksanaan pelatihan ini harus sesuai dengan sembilan prinsip pelaksanaan pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne dalam buku *The Condition of Learning and Theory of Instruction* (1985) yaitu: (1) menarik perhatian (*gaining attention*), (2) menyampaikan tujuan pembelajaran (*informing learners of the objectives*), (3) mengingatkan konsep/prinsip yang telah dipelajari (*stimulating recall or prior learning*), (4) menyampaikan materi pelajaran (*presenting the stimulus*), (5) memberikan bimbingan belajar (*providing "learner guidance"*), (6) memperoleh kinerja/penampilan siswa (*eliciting performance*), (7) memberikan balikan (*providing feedback*), (8) menilai hasil belajar (*assesing performance*), dan (9) memperkuat retensi dan transfer belajar (*enhancing retention & transfer*).
10. Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam tahapan desain adalah menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelatihan ini antara lain sebagai berikut: (1) perizinan dan pihak yang akan mendanai pelatihan; (2) tim desain dan pengembangan seperti ahli materi PAUD, desainer pembelajaran, pelatih, desainer media pembelajaran, dan lain sebagainya; (3) administrasi mulai dari registrasi, dokumentasi, dan lain sebagainya; logistik seperti ruangan (ukuran dan fasilitas yang memadai), peralatan audio visual, *flipchart*, makanan, dan lain sebagainya; evaluasi seperti tim yang akan mengevaluasi pelatihan dan menindak lanjut pelatihan; dan rincian serta total biaya untuk seluruh pembuatan dan penyelenggaraan pelatihan.
11. Pada tahap pengembangan (*development*) selanjutnya mengembangkan lebih detail isu pokok yang telah dirumuskan sebelumnya. Bagaimana strategi pembelajaran (urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, waktu) serta instrumen evaluasi dirancang menjadi satu cetak-biru (*blueprint*) rencana pembelajaran satu program pelatihan, secara sistemik dan sistematis diselesaikan dalam tahap ini sebelum dipakai acuan dalam implementasinya. Begitu pula bahan ajar, panduan untuk pelatih (*trainer's guide*), serta kriteria pelatih atau pembelajar dan peserta pelatihan atau pembelajar lebih rinci lagi ditetapkan dalam tahap pengembangan ini.
12. Dalam strategi pembelajaran terdapat urutan kegiatan pembelajaran yang mencakup empat komponen utama yaitu urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, dan waktu. Adapun sub komponen dari urutan kegiatan pembelajaran yaitu: (1) pendahuluan yang didalamnya terdapat deskripsi singkat tentang isi pelajaran, relevansi isi materi dengan pengalaman peserta, dan tujuan pembelajaran khusus pelatihan; (2) penyajian yang terdiri dari uraian, contoh, dan latihan; serta (3) penutup yang terdiri dari tes formatif, umpan balik, dan tindak lanjut. Setelah mempelajari materi-materi pokok dan tujuan pelatihan, adapun komponen metode pembelajaran yang perlu dipertimbangkan dalam pelatihan ini antara lain sebagai berikut. (1) Metode ceramah berbentuk penjelasan pengajar kepada mahasiswa dan biasanya diikuti dengan tanya jawab. (2) Metode demonstrasi mengambil bentuk sebagai contoh pelaksanaan suatu

keterampilan atau proses kegiatan. Penggunaan metode ini mempersyaratkan adanya suatu keahlian untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan yang sesungguhnya. (3) Metode penampilan berbentuk pelaksanaan praktik oleh peserta di bawah supervisi dari dekat oleh pelatih. (4) Metode diskusi merupakan interaksi antara peserta dengan peserta atau peserta dengan pelatih untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (5) Metode bermain peran berbentuk interaksi antara dua atau lebih mahasiswa tentang suatu topik atau situasi. Komponen ketiga adalah media pembelajaran, media yang akan digunakan dalam pelatihan ini beraneka ragam disesuaikan dengan tujuan pembelajaran tertentu. Pertimbangan yang perlu dijadikan acuan dalam pemilihan media pembelajaran antara lain: (1) biaya yang lebih murah, baik pada saat pembelian maupun pemeliharaan; (2) kesesuaiannya dengan metode pembelajaran; (3) pertimbangan praktis (kemudahan dipindahkan/ditempatkan, kesesuaiannya dengan fasilitas di kelas, keamanan penggunaannya, dan kemudahan perbaikannya); dan (4) ketersediaan media tersebut berikut suku cadangnya di pasaran serta ketersediannya bagi mahasiswa. Komponen yang terakhir adalah waktu, pengaturan waktu yang seimbang antara waktu pelatih menyelesaikan langkah-langkah dalam urutan kegiatan pembelajaran, waktu peserta untuk latihan dan mengerjakan tugas serta mengerjakan tes formatif menjadi dasar pertimbangan yang penting dilakukan. (Suparman, 2004).

13. Penyusunan bahan belajar untuk peserta membutuhkan pelatih sebagai penyaji bahan belajar yang dipilih. Bahan belajar tersebut dipilih oleh pelatih atas dasar kesesuaiannya dengan strategi pembelajaran yang telah disusunnya dan menggunakan bahan belajar yang telah tersedia di lapangan. Pe-

latih menyajikan isi materi pelatihan sesuai dengan strategi pembelajaran yang disusunnya dengan menambah atau mengurangi materi yang ada di dalam bahan belajar yang digunakan. Bahan pembelajaran yang harus disiapkan pengembang pembelajaran terdiri atas: Garis-garis besar program pembelajaran, bahan pembelajaran yang kebetulan ada di lapangan, tetapi relevan dengan strategi pembelajaran yang telah disusunnya dan tes. (Suparman, 2004) Untuk mempermudah pelatih dalam melaksanakan pelatihan perlu dibuatkan juga panduan untuk pelatih. Penyusunan panduan untuk pelatih ini disesuaikan dengan strategi pembelajaran dan bahan pembelajaran yang telah dikembangkan. Pemilihan pelatih juga hal yang penting untuk dipertimbangkan, untuk itu perlu dirumuskan kriteria pelatih sebagai berikut: (1) pelatih memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang terkait dengan PAUD atau pendidikan, (2) pelatih dapat berasal dari akademisi atau praktisi PAUD atau pendidikan, (3) pelatih diutamakan memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan bidang PAUD atau pendidikan, (4) pelatih bersedia mengikuti program *Training of Trainers*, dan (5) pelatih memiliki motivasi dan komitmen yang tinggi untuk memberikan pelatihan kepada kader PAUD (Pendidikan AUD, BKB, dan Posyandu) di tingkat pusat maupun daerah.

14. Dalam tahap Implementasi (*implementation*) yang harus dipersiapkan adalah: (1) pembuatan *Term of Reference (TOR)* pelatihan; (2) menyiapkan pelatih melalui *Training of Trainers (TOT)*, (3) memberikan *pre-test* (sebelum) dan *post-test* (sesudah) pelatihan, (4) menyiapkan semua keperluan logistik pelatihan seperti ruang kelas (memilih *layout* ruang kelas yang tepat), peralatan audio visual, *handout* peserta, makanan, dan lain sebagainya; (5) administrasi dan registrasi peserta; dan (6) penyampaian pelatihan di kelas. Dalam penyampaian pelatihan di kelas, tujuan utama yang

harus diperhatikan antara lain membimbing peserta untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi, menjamin terjadinya pemecahan masalah/solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang dihadapi oleh siswa, dan memastikan bahwa pada akhir program pelatihan peserta perlu memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan (Pribadi, 2009).

15. Dalam tahap Evaluasi (*evaluation*), bertujuan untuk memastikan kualitas dan efektivitas dari seluruh proses desain pembelajaran dan hasil akhir dari pelatihan, serta sejauhmana ketercapaian tujuan program. Menurut Kirkpatrick (2008) ada empat level evaluasi antara lain sebagai berikut. (1) Level 1 reaksi (*reaction*) yang bertujuan untuk mengungkapkan reaksi dan kepuasan dari peserta terhadap program pelatihan dan pelatihnya, untuk memperbaiki materi pelatihan, desain, teknik penyampaian (dan waktu penyampaian) dari program. Evaluasi ini yang paling mudah, murah, dan cepat untuk dilaksanakan, metode yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara (*interview*). (2) Evaluasi level 2 pembelajaran (*learning*) yang bertujuan untuk mengukur apa saja yang telah dipelajari dari peserta di pelatihan dan apakah si peserta dapat membuktikan/mendemonstrasikannya, memperbaiki materi pelatihan, desain dan teknik penyampaian dari program. Waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk membuat tes/evaluasi lebih besar dibandingkan level 1 dan waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi juga lebih lama. Metode yang digunakan formal tes baik tertulis/lisan dan observasi (praktek simulasi/studi kasus). (3) Evaluasi level 3 sikap/perilaku (*behavior*) bertujuan untuk mengukur perubahan sikap/perilaku dari peserta di lingkungan kerja dan untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan di tempat kerja (faktor pendukung, faktor penghambat, dan faktor apa saja yang belum ada untuk mendukung pelatihan).

Biasanya waktu evaluasi dilakukan 1-3 bulan setelah program pelatihan dilaksanakan. Evaluasi ini lebih sulit dilaksanakan karena waktu dan usaha yang dibutuhkan lebih banyak, data yang dibutuhkan belum tentu tersedia, serta sulit mengisolasi efek dari pelatihan. Metode berupa kuesioner dan sesi tindak lanjut (*followup session*). (4) Evaluasi level 4 *Business impact* yang bertujuan untuk mengukur efek dari pelatihan dalam memperbaiki kinerja organisasi (penghematan biaya, peningkatan tingkat *output*, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan pekerja, dan lain sebagainya. Menurut penelitian ASTD oleh Mark E. Van Buren (2002) persentase perusahaan yang menggunakan evaluasi 4 level yaitu 78% menggunakan evaluasi level 1, 32% menggunakan evaluasi level 2, 9% menggunakan evaluasi level 3, dan hanya 7% yang menggunakan evaluasi level 4. Pada konteks pelatihan ini evaluasi yang dapat dilaksanakan adalah evaluasi level 1, level 2, dan level 3. Evaluasi level 1 dan 2 dapat dilaksanakan setelah pelatihan selesai. Sedangkan untuk evaluasi level 3 dilaksanakan setelah kader kembali ke lapangan, evaluasi ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak mulai dari kader PAUD, pengawas PAUD, dan pemerintah tingkat propinsi maupun daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi penerapan pelatihan yang dilaksanakan kader di lapangan.

## SIMPULAN

Untuk menghadapi tantangan pelaksanaan keterpaduan PAUD yang holistik dan terintegrasi tidak hanya membutuhkan intervensi pembelajaran berupa pelatihan untuk kader PAUD dan Pengawas lapangan tetapi juga sosialisasi bagi pengelola tingkat pusat dan daerah. Sementara itu intervensi bukan pembelajaran juga harus dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan dengan intervensi pembelajaran. Dalam konteks intervensi pembelajaran salah satunya melalui pelatihan

yang diberikan kepada kader BKB, PAUD, dan Posyandu. Pelatihan formal lebih sesuai untuk diterapkan mengingat jumlah peserta yang cukup banyak dan materi yang cukup padat. Selain itu, intervensi pembelajaran lainnya mencakup pembelajaran mandiri melalui modul, pembelajaran melalui *Online Learning*, dan yang dapat dilaksanakan sebagai alternatif strategi pembelajaran yang lain. Strategi pembelajaran *On-The-Job Training/coaching/mentoring* dapat dilakukan secara berkelompok setelah peserta mengikuti pelatihan dan kembali ke tempat kerja, strategi ini dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mengawasi dan memperbaiki kinerja kader saat praktek di lapangan (sebagai salah satu kegiatan evaluasi pasca pelatihan). Perancangan Pelatihan maupun pendampingan dapat dilakukan oleh perguruan tinggi atau relawan yang ahli di bidang PAUD sebagai ahli materi (*subject matter expert*) dan ahli Teknologi Pendidikan sebagai perancang sistem pembelajaran (*instructional system designer*) serta mengevaluasi program pelatihan (*training program evaluator*). Selain itu diperlukan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang terintegrasi sebagai pedoman bagi para pelaksana di lapangan. Pelatihan, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tidak hanya diberikan kepada Kader BKB, PAUD, dan Posyandu tetapi juga kepada pengawas lapangan BKB, PAUD, dan Posyandu; sehingga pengawas dapat menilai secara objektif transfer pelatihan (*transfer of training*) yang diterapkan oleh kader ketika bertugas di lapangan. Solusi bukan pembelajaran mencakup: (1) ketersediaan dana untuk mendukung proses pelaksanaan pelatihan dan insentif kader serta pengelola program pelatihan selama menjalankan tugas di lapangan; (2) ketersediaan sarana dan prasarana selama pelatihan dan setelah kader kembali bertugas di lapangan); (3) adanya dukungan dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pemahaman keterpaduan

pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi terutama keterpaduan PAUD, BKB, dan Posyandu; (4) untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan PAUD yang terintegrasi, perlu disusun indikator proses dan *output* serta mekanisme monitoringnya; serta (5) mekanisme koordinasi dilakukan antar pemangku kepentingan program PAUD pada tingkat pemerintah pusat dan daerah dan dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, S. S. 2008. Studi Identifikasi Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Tahun II, No. 2, 2008*. Jakarta: BKKBN.
- Arsyad, S. S. 2010. *Kajian Hasil Studi Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita*. Jakarta: BKKBN.
- Bappenas. 2009. *Studi Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini yang Holistik dan Terintegrasi*. Jakarta: Bappenas.
- BKKBN. 2007. *Bahan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2008. *Panduan Pelayanan Terpadu Pengembangan Anak Usia Dini "Balita Sehat Ceria" (Integrasi Posyandu, BKB, dan PAUD)*. Sulawesi Tengah: Kerjasama BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, dan Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bloom, Benjamin S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain*. New York: Longman Inc.
- Buren, Mark. E. V., and William Erskine. 2002. *The 2002 ASTD Learning Outcomes Project*. Alexandria: ASTD.
- Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia. 2002. *Acuan Menu Pembelajaran Pendidikan Dini Usia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
- Flemming, N.D. 2001. *Teaching and Learning Styles: VARK Strategies 5<sup>th</sup> Edition*. New Zealand: Christchurch.

- Gagne, R. M. 1985. *The Conditions of Learning and Theory of Instruction*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Kirkpatrick, D. L., and James D. Kirkpatrick. 2008. *Evaluating Training Programs 3<sup>rd</sup> Edition*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Pribadi, B. A. 2009. *Model Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Stolovitch, H.D., and Erica J. Keeps (Eds). 1992. *Handbook of Human Performance Technology 1st Edition*. San Francisco: Josey-Bass Publishers.
- Suparman, M. A. 2004. *Desain Instruksional*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suparto, Sridadi P. 2006. *Desain Pelatihan*. Jakarta: BKKBN.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.